

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PULAU JAWA TAHUN 2008-2015

NISA PUTRI BAGASWATI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

ABSTRACT: *The aim of this reaserch is for explore the impact of income and expenditure part of the Fiscal Decentralization toward Disparity in Java Region Year from 2008-2015. This reasearch has done by using secondary data which got from Stastic Bureau Council of DI Yogyakarta. The use of panel data method is necersary in this research by combining 6 Provinces in Java Region. The analysis that has been used in this researchis descriptive and inductive.*

From te output of the analysis we can conclude that Fiscal Decentralization's degree, Indirect Expenditure, direct Expenditure, Inflation, and Labor have a significant effect towards Disparity. With 10% degree of relience. Fiscal Decentralization's degree and Indirect Expenditure have a negative and signifcatt impact towards Disparity in Java Region, while direct Expenditure, and Inflation have a positive and significant impact towards Disparity in Java Region. Meanwhile labor have a positif and insignificant impact towards Disparity in Java Region.

Keywords : Regional Disparity, Fiscal Decentralization, Indirect Expenditure, Direct Expenditure, Inflation, Labor, Panel Data

INTISARI: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal pada sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap angka ketimpangan wilayah di Pulau Jawa Tahun 2008- 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode data panel yaang terdiri dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif.

Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Inflasi dan Tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan. Dengan tingkat kepercayaan 10%. Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal dan

Belanja tidak langsung memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan, sedangkan Belanja Langsung, Inflasi, dan Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan di wilayah Pulau Jawa.

Kata Kunci : Ketimpangan Wilayah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Inflasi, Tenaga Kerja, data Panel

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini dalam masa pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam perkembangannya senantiasa memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi kondisi keseimbangan perekonomian di Indonesia. Dampak yang dalam perkembangannya seringkali terjadi adalah ketimpangan (*disparity*) wilayah antar daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kondisi masing-masing yang menjadi faktor atas adanya ketimpangan, diantaranya latar belakang geografis, potensi sumber daya alam maupun manusia, dan potensi keuangan. Salah satu potensi yang menjadi faktor penting adalah potensi keuangan, potensi ini dilihat dari tingkat pendapatan daerah. Adanya perbedaan tingkat pendapatan inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan antar daerah. Adanya laju pertumbuhan ekonomi yang tanpa disertai dengan pemerataan memperparah keadaan ketimpangan wilayah tersebut.

Ketimpangan antar wilayah yang terjadi akibat potensi keuangan yang berbeda antar wilayah ini, menjadi salah satu dasar adanya kebijakan implikasi dari pemerintah yaitu kebijakan di sisi fiskal yaitu distribusi pendapatan yang disebut dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dibutuhkan mengingat pentingnya campur tangan pemerintah dalam memecahkan permasalahan struktural perekonomian, dengan adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah antar daerah di Indonesia.

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah telah diterapkan di Indonesia selama hampir dua dasawarsa. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimulai sejak adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah serta hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perubahan sistem pemerintahan, dari sistem sentralistis menjadi desentralisasi, mengandung arti adanya pengalihan sebagian besar wewenang pemerintahan yang semula dari pemerintahan pusat beralih ke

pemerintahan daerah. Beberapa wewenang yang masih menjadi otoritas pemerintahan pusat diantaranya adalah wewenang di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, serta agama. Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Dengan prinsip dasar pelaksanaannya adalah "*Money Follows Function*", artinya fungsi pokok pelayanan publik beralih ke daerah, dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Ketimpangan Wilayah

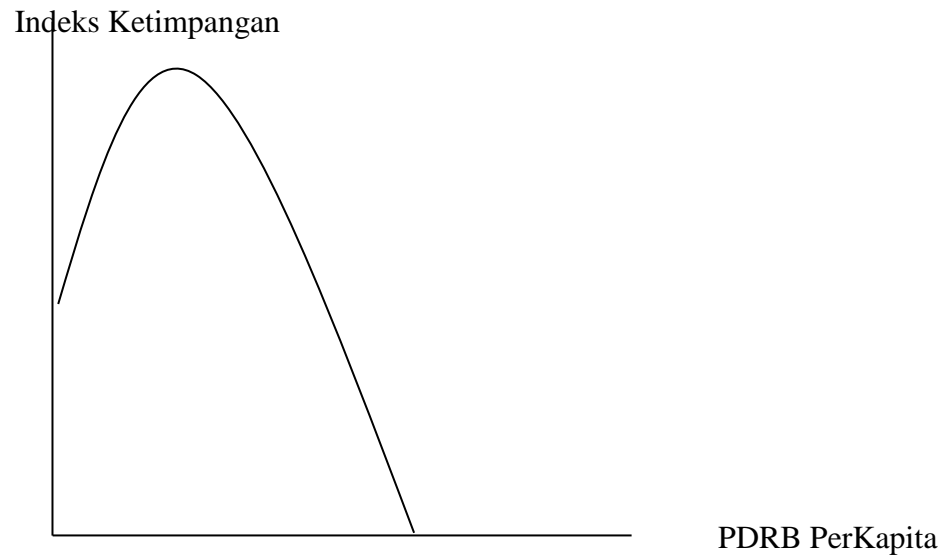
Adanya perbedaan kemajuan antar wilayah berarti adanya ketidaksamaan kemampuan untuk tumbuh atau dengan artian adanya kesenjangan sehingga timbul ketidakmerataan. Hal ini memunculkan berbagai pendapat dan studi-studi bersifat empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang saling berhubungan. Kuznet (1995) dalam hipotesis yang dikenal sebagai *U Hypothesis*, mengatakan bahwa ada pola *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan kemajuan pembangunan ekonomi pada saat mencapai tahap tertentu *trade off* akan tergantikan dengan kolerasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan yang disebabkan pertumbuhan pada yang tahap awal pembangunan yang cenderung hanya ke arah sektor modern saja.

Terdapat berbagai tipe pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Penelitian dengan data silang tempat oleh Kuznetz (1955), diakui sebagai pelopor penelitian komparatif dalam distribusi pendapatan. Penelitian empiris Kuznetz mensintesisikan adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*), yaitu pada awal ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin

tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata, seperti yang ditunjukkan pada kurva berikut:

Grafik 2.1

KURVA “U” TERBALIK (Hipotesis Kuznetz)



Sumber : Todaro, 2000

Pada Hipotesis Neo-Klasik diuji kebenarannya melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang.

Pengukuran ketimpangan (*disparity*) memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Beberapa metode pengukuran yang sering digunakan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Indeks Williamson

Indeks Williamson mengukur disparitas dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata-rata pendapatan nasional.

Rumus Indeks Williamson adalah (Syafrizal,2012) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}}{Y}$$

Keterangan

Y_i = PDRB per Kapita di Provinsi

Y = PDRB per Kapita rata-rata Nasional

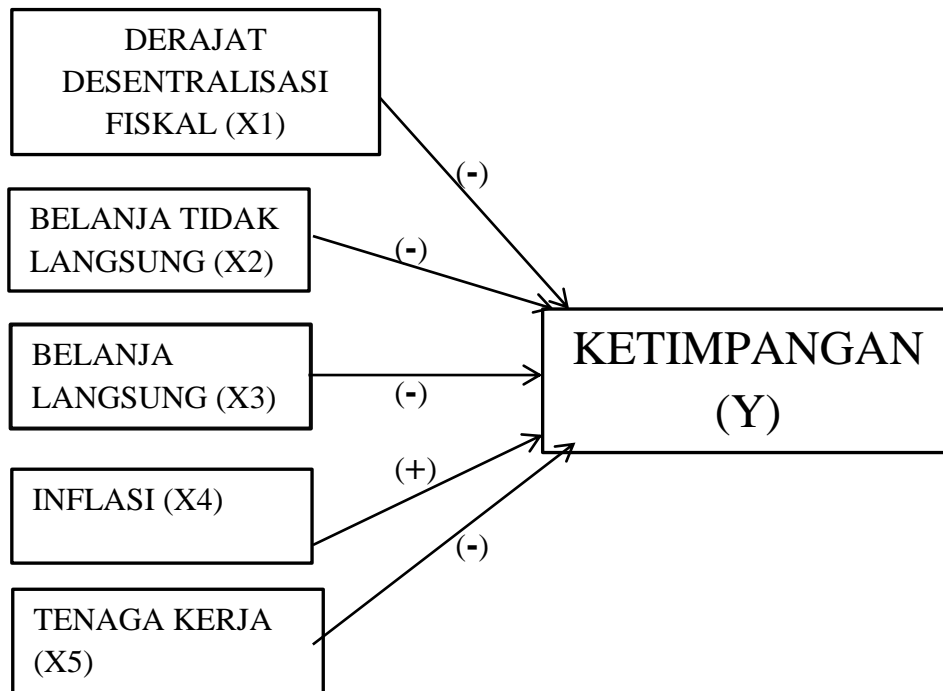
f_i = Jumlah penduduk di Provinsi

n = Jumlah Penduduk Nasional

2. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Sasana, 2009).

Dalam penyusunan penelitian ilmiah ini, paparan teori akan disusun dalam kerangka teoritis sebagai berikut :



Sumber : Kuncoro (2004)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk *time series* dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, dan data *cross section* yang terdiri atas 6 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, sehingga merupakan *polled the data* yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2008-2015: 8 tahun) dengan data *cross section* 6 provinsi. Kasus analisisnya memenuhi persyaratan dari model yang digunakan yaitu metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan data PLS (*Panel Least Square*). Pengumpulan data dilakukan melalui kumpulan data resmi Direktorat Jendral

Perimbangan Keuangan (DPJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) baik melalui web maupun dari buku terbitan Kementrian Keuangan dan BPS, perpustakaan yang berupa referensi statistik, terbitan berkala, buku, dokumen, maupun koleksi-koleksi khusus serta jurnal-jurnal penelitian dan media internet.

Variabel yang digunakan dalam penelitian “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan di Wilayah Pulau Jawa Tahun 2008-2015” adalah dengan variabel Terikat Ketimpangan Wilayah Provinsi-Provinsi di wilayah Pulau Jawa dan variabel bebas terdiri atas derajat desentralisasi fiskal, belanja tidak langsung, belanja langsung, Inflasi dan tenaga kerja. Definisi variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan (Y)

Ketimpangan antar daerah merupakan kesenjangan ekonomi antar wilayah keenam provinsi di Pulau Jawa, yang diproksi dengan nilai Indeks Williamson masing-masing provinsi dalam satuan desimal.

Rumus Indeks Williamson adalah (Syafrizal,2012) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan

- Y_i = PDRB per Kapita di Provinsi i
- Y = PDRB per Kapita rata-rata Nasional
- f_i = Jumlah penduduk di Provinsi i
- n = Jumlah Penduduk Nasional

2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal digambarkan sebagai seberapa besar angka ketergantungan setiap provinsi di Pulau Jawa terhadap pemerintah pusat dalam

pembiayaan anggaran pembangunan. Derajat desentralisasi dinyatakan dengan bentuk persen. Berikut rumus pengolah derajat desentralisasi fiskal:

$$DF_{it} = \frac{PAD_{it}}{TPD_{it}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

DF_{it} = derajat desentralisasi fiskal Provinsi i, pada tahun t

PAD_{it} = Pendapatan asli daerah Provinsi i, pada tahun t

TPD_{it} = Total Penerimaan daerah Provinsi i, pada tahun t

Semakin besar nilai DF semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya semakin tinggi angka maka akan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah dan semakin rendah ketergantungan daerah tersebut dari pemerintah Pusat. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam Buku Keuangan Daerah Menurut Provinsi selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

3. Pengeluaran Belanja Pemerintah

Data Pengeluaran belanja Pemerintah dibagi menjadi dua yaitu Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung. Data diperoleh dari buku terbitan Badan Pusat Statistik pusat dan Kementerian Keuangan RI (www.djpk.kemenkeu.go.id) selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dan dinyatakan dalam ribu Rupiah atau dalam kondisi sebenarnya.

4. Inflasi

Inflasi dalam penelitian ini menggunakan angka inflasi yang terjadi pada kota-kota besar pada provinsi dan dilakukan penghitungan rata-rata pada provinsi yang memiliki kota dengan angka inflasi. Satuan dari inflasi adalah persen.

5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja digunakan dalam mewakili *resource* yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan dapat mempengaruhi ketimpangan. Tenaga kerja dalam penelitian ini diukur dengan jumlah angkatan kerja per tahun per wilayah yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Satuan dari tenaga kerja adalah jiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam pengujian sebetulnya, model telah lolos uji asumsi klasik, sehingga hasil yang didapatkan setelah estimasi konsisten dan tidak menunjukkan tanda bias. Berikut hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak enam provinsi selama periode 2008-2015 (8 Tahun).

TABEL 5.1
HASIL ESTIMASI MODEL FIXED EFFECT

Variabel dependent : (KT) Ketimpangan	Fixed Effect Model
Konstanta (C)	-2.950450
Standar error	1.922157
Probabilitas	0.1333
t-statistik	-1.534968
(DF) Derajat Desentralisasi (X1)	-0.001493
Standar error	1.922157
Probabilitas	0.0516
t-statistik	-1.534968
(BTL) Belanja Tidak Langsung (X2)	-0.088737
Standar error	0.022941
Probabilitas	0.0004
t-statistik	-3.868092

(BL) Belanja Langsung (X3)	0.059324
Standar error	0.023427
(BL) Belanja Langsung (X3)	Fixed Effect Model
Probabilitas	0.0157
t-statistik	2.532364
(INF) Inflasi (X4)	0.004750
Standar error	0.002194
Probabilitas	0.0370
t-statistik	2.164354
(TK) Tenaga Kerja (X5)	0.239878
Standar error	0.239878
Probabilitas	0.0813
t-statistik	1.792346
F-Statistik	87.24947
Prob (F-Stat)	0.000000
Durbin-Watson Stat	1.572297

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 7.0 (Lampiran Ke-2)

1. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan

Derajat desentralisasi dari sisi penerimaan ini dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Total pendapatan Daerah Provinsi. Tingkat kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat dilihat dari data derajat ini. Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan pemerataan ekonomi pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, X1 (Derajat Desentralisasi) menunjukkan hubungan negatif dan berpengaruh signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk keenam Provinsi di Pulau Jawa. Variabel desentralisasi fiskal mempunyai koefisien negatif yang berarti anatar variabel desentralisasi

fiskal dengan ketimpangan mempunyai hubungan negatif. Koefisien derajat desentralisasi mempunyai nilai sebesar -0,001493 yang berarti apabila terjadi kenaikan derajat desentralisasi sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan menurun sebesar -0,001493% *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan desentralisasi fiskal bernilai negatif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabel independen mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan berlawanan mengikuti ke arah penurunan/kenaikan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata desentralisasi fiskal mempengaruhi Ketimpangan di enam Provinsi di Pulau Jawa.

Sehingga hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya milik Rosdyana (2015) bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan ketimpangan. Sedangkan menurut Teori yang dibentuk bahwa adanya desentralisasi fiskal untuk membentuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pada masyarakat. Teori tersebut mendasari dibentuknya hipotesis bahwa desentralisasi diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dan menyatakan bahwa “Desentralisasi Fiskal berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Ketimpangan pada enam Provinsi di wilayah Pulau Jawa “

2. Pengaruh Belanja Tidak langsung terhadap Ketimpangan

Derdasarkan hasil penelitian, X2 (Belanja tidak langsung) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk keenam Provinsi di Pulau Jawa. Variabel Belanja tidak langsung mempunyai koefisien negatif yang berarti antara variabel belanja tidak langsung

dengan ketimpangan memiliki hubungan negatif. Koefisien belanja tidak langsung mempunyai nilai sebesar $-0,088737$ yang berarti apabila terjadi kenaikan belanja tidak langsung sebesar 1000 rupiah sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan menurun sebesar $-0,088737\%$ *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan belanja tidak langsung bernilai negatif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabel independen mengalami kenaikan/penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan berlawanan mengikuti ke arah penurunan/kenaikan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata belanja tidak langsung mempengaruhi Ketimpangan di enam Provinsi di Pulau Jawa.

Dalam penelitian sebelumnya milik Rodriguez-Pose dan Ezcurra (2009) menyatakan bahwa belanja pengeluaran pada negara berkembang berkorelasi positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan nasional. Penelitian tersebut mendasari hipotesis yang menduga bahwa hubungan belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesa dan menyatakan bahwa variabel “Belanja tidak Langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan”

3. Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Ketimpangan

Berdasarkan hasil penelitian, X_3 (Belanja Langsung) menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk enam Provinsi di Pulau Jawa. Variabel Belanja Langsung mempunyai koefisien positif yang berarti bahwa hubungan antara belanja langsung dengan ketimpangan memiliki hubungan positif. Koefisien Belanja Langsung mempunyai nilai sebesar $0,05932$ yang berarti apabila terjadi kenaikan nilai belanja langsung

sebesar 1000 Rupiah sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan meningkat sebesar 0,05932% *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan belanja langsung bernilai positif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabel independen mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan mengikuti ke arah yang sama yaitu kenaikan/penurunan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata belanja langsung mempengaruhi Ketimpangan di enam provinsi di Pulau Jawa.

Dalam penelitian sebelumnya (Nurman, 2009) menjelaskan bahwa belanja langsung pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan regional. Penelitian tersebut mendasari hipotesis yang menduga bahwa hubungan belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesa dan menyatakan bahwa variabel “Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan”

4. Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan

Berdasarkan hasil penelitian, X4 (Inflasi) menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk enam provinsi di Pulau Jawa. Variabel Inflasi mempunyai koefisien positif yang berarti bahwa hubungan antara inflasi dengan Ketimpangan memiliki hubungan positif. Koefisien Inflasi mempunyai nilai sebesar 0,004749 yang berarti apabila terjadi kenaikan nilai inflasi sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan meningkat sebesar 0,004749% *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan inflasi bernilai positif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabel independen mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan mengikuti ke arah yang sama yaitu kenaikan/penurunan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata inflasi mempengaruhi Ketimpangan di enam provinsi di Pulau Jawa.

Hipotesis yang menduga bahwa hubungan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan dapat diterima, Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesa dan menyatakan bahwa variabel “Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan”

5. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan

Berdasarkan hasil penelitian, X5 (Tenaga Kerja) menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 10% untuk enam Provinsi di Pulau Jawa. Variabel tenaga kerja mempunyai koefisien positif yang berarti bahwa hubungan antara tenaga kerja dengan Ketimpangan memiliki hubungan positif secara signifikan. Koefisien Inflasi mempunyai nilai sebesar 0,23988 yang berarti apabila terjadi kenaikan nilai tenaga kerja sebesar 1 jiwa sedangkan variabel lain tetap maka ada perubahan dalam jumlah variabel dependen yaitu KT (Ketimpangan) akan meningkat sebesar 0,23988 % *vice versa*.

Dalam penelitian ini terlihat hubungan tenaga kerja bernilai positif terhadap Ketimpangan, diartikan bahwa ketika variabel yang berada di sisi kanan model atau sebagai variabel independen mengalami kenaikan/ penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan mengikuti ke arah yang sama yaitu kenaikan/penurunan. Dalam hal ini terlihat bahwa ternyata tenaga kerja tidak secara signifikan mempengaruhi Ketimpangan di enam Provinsi di Pulau Jawa.

Menurut penelitian (Dewi Rosdyana, 2015) tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara teori adanya tenaga kerja yang besar, akan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam PDRB, secara langsung hal ini dapat meningkatkan PDRB per kapita yang menyebabkan penurunan ketimpangan. Hal ini mendasari pembentukan hipotesis yang menduga bahwa hubungan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan dapat diterima, Sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesa dan menyatakan bahwa variabel “Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan”

KESIMPULAN

Dari penelitian dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan wilayah di Pulau Jawa tahun 2008-2015 ini dapat disimpulkan bahwa :

Desentralisasi fiskal dalam sisi penerimaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa.

Desentralisasi fiskal sisi pengeluaran yang dibagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung memiliki dampak yang berbeda terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Belanja tidak langsung memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan sedangkan belanja langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa

Inflasi sebagai variabel pendukung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa.

Tenaga kerja yang juga sebagai variabel pendukung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, a. S. (2005). *Fiscal Decentralization, commitment and regional inequality: Evidance from state level cross-Sectional data for The United States*. Osaka: Osaka International University.
- Altito R. Siagian, M. (2010). Dampak DesentralisasiI Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (studi kasus Jawa Barat). *Disertasi Universitas Diponegoro*.
- Apriesa, L. F. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Economics*.
- Bahl, R. W. (2000). China: Evaluating The Impact of Intergovern Mental Fiscal Reform in Fiscal Decentralization in Developing Countries.
- Barzelay, M. (1991). *Managing local development: lessons from Spain*.
- Basuki, A. T. (2015). *Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Boediono. (2010). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPPE.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Satistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2008-2011*.
- _____ . (2014). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2011-2013*.
- _____ . (2014). *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi* .
- _____ . (2016). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2013-2016*.
- Dewi Rosdyana, E. S. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertmbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa 2009-2013. *Gunadarma University* .
- Djoni Hartono, &. T. (2008). *Decentralization policy and equality: A theil analysis of Indonesia income inequality*. Bandung: Padjajaran University.
- Gujarati. (2000). *Basic Econometrics*. . Singapore: Graw-Hill.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Economic Forth Edition*. New York: The Mc. Growth Hill Companies Inc.
- Hamid, E. S. (2005). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Jhingan, M. (2004). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jin, J. d.-F. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China . *World Bank Working Paper Series 1452*.
- Juliansyah, R. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja Di Kalimantan Timur. *Desertasi Univertas Hasanuddin, Makasar*.
- Kemenkeu, R. (2012). Kebijakan Desentralisasi. In *Nota Keuangan dan RAPBN 2011*.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum dan Sesudah era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Padjajaran*.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter, Buku II*. Yogyakarta: BPPE.
- Nurman, M. A. (2009). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatn Regional di Indonesia tahun 2001-2008. *BPKP RI*.
- Prud'homme, R. (1995). On The Danger of Decentralization. Washington DC: The World Bank.
- Sasetya, H. (2005). Kausalitas antara Inflasi dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia 1977-2005. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Siagian, A. R. (2010). DAMPAK DESENTRALISASI FISKALTERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN KETIMPANGAN WILAYAH (STUDI KASUSU JAWA BARAT). *UNDIP DESERTASI*.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi Regional :Teori dan Aplikasi* . Padang: Badouse Media.
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi ke Sembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widhiyanto, I. (2008). Fiscal Decetralization and Indonesia regional Income Disparity. *Jurnal Keuangan Publik*.

Zasriati, M. (2011). *Analisis Pengaruh Alokasi Dana perimbangan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional Provinsi Jambi*. Skripsi.

